

**MAKALAH MATA KULIAH LEMBAGA  
PHILANTROPI ISLAM  
POKOK BAHASAN MINGGU 1 : FILANTROPI TERKAIT  
DENGAN UU**



**Disusun Oleh :**

**REHAGEL REISA      (23240010)**

**SILVI OCTAVIANI A   (23240021)**

**SURYA ADHI P        (23240026)**

**FIKRI SAID            (23240032)**

**PUTRI RIFKI REISA   (23240042)**

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM  
YOGYAKARTA PROGRAM STUDI  
EKONOMI SYARIAH  
2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	3
<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>1.1. Filantropi</b> .....	3
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>BAB II</b> .....	5
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	5
<b>2.1. Definisi</b> .....	5
<b>BAB IV</b> .....	7
<b>PEMBAHASAN</b> .....	7
<b>4.1 Definisi Filantropi dalam Perspektif Hukum</b> .....	7
<b>4.2 Regulasi Filantropi di Indonesia</b> .....	9
<b>4.3 Perpajakan dalam Kegiatan Filantropi</b> .....	12
<b>4.4 Tantangan dalam Pelaksanaan Filantropi</b> .....	15
<b>4.5 Peluang untuk Pengembangan Filantropi di Indonesia</b> .....	18
<b>Kesimpulan</b> .....	20
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Filantropi**

Filantropi merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mendukung kesejahteraan sosial melalui donasi, bantuan finansial, maupun kontribusi lainnya. Aktivitas filantropi telah menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kegiatan filantropi tidak terlepas dari peraturan hukum yang mengatur pelaksanaannya agar tetap berjalan sesuai dengan norma, etika, dan undang-undang yang berlaku. Aini, N. (2020)

Filantropi merupakan salah satu konsep penting yang mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab sosial individu serta organisasi terhadap masyarakat. Dalam konteks Indonesia, filantropi tidak hanya berperan sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan latar belakang sosial yang beragam dan tantangan yang dihadapi, filantropi dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Aini, N. (2020)

Namun, meskipun filantropi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberadaannya harus diatur oleh perundang-undangan untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, sejumlah undang-undang mengatur tentang yayasan, lembaga amal, dan pengelolaan zakat yang menjadi landasan hukum bagi kegiatan filantropi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak penerima manfaat serta mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan amal dan donasi.

Pentingnya memahami hubungan antara filantropi dan hukum di Indonesia menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh sektor ini. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai definisi filantropi dari perspektif hukum, regulasi yang mengatur pelaksanaannya, serta tantangan dan peluang yang ada. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika filantropi dan peranannya dalam pembangunan sosial di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur dan mempengaruhi kegiatan filantropi di Indonesia?	9. Bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur dan mempengaruhi kegiatan filantropi di Indonesia?
2. Apakah undang-undang yang berlaku saat ini mendukung atau menghambat pertumbuhan sektor filantropi?	10. Apakah undang-undang yang berlaku saat ini mendukung atau menghambat pertumbuhan sektor filantropi?
3. Sejauh mana peraturan perpajakan mempengaruhi donasi dan kegiatan amal di Indonesia?	11. Sejauh mana peraturan perpajakan mempengaruhi donasi dan kegiatan amal di Indonesia?
4. Bagaimana regulasi yang ada melindungi kepentingan donor dan penerima manfaat dalam kegiatan filantropi?	12. Bagaimana regulasi yang ada melindungi kepentingan donor dan penerima manfaat dalam kegiatan filantropi?
5. Apakah ada celah hukum yang dapat disalahgunakan dalam praktik filantropi di Indonesia?	13. Apakah ada celah hukum yang dapat disalahgunakan dalam praktik filantropi di Indonesia?
6. Bagaimana undang-undang mengatur transparansi dan akuntabilitas organisasi filantropi?	14. Bagaimana undang-undang mengatur transparansi dan akuntabilitas organisasi filantropi?
7. Sejauh mana peraturan yang ada mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi filantropi?	15. Sejauh mana peraturan yang ada mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi filantropi?
8. Apakah ada konflik antara hukum filantropi dengan peraturan lain yang relevan (misalnya, hukum yayasan atau hukum perpajakan)?	16. Apakah ada konflik antara hukum filantropi dengan peraturan lain yang relevan (misalnya, hukum yayasan atau hukum perpajakan)?

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Definisi**

Istilah *filantropi* dalam definisi secara umum berasal dari kata *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi merupakan bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi dapat berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama. Secara lebih luas, akar kata filantropi adalah “*loving people*” sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagaman di belahan dunia, sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan.<sup>1</sup> Filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service* (*social administration*), *social work* dan *philanthropy*. Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama, khususnya di masyarakat pedesaan. Fatwa, A. (2019).

Dasar hukum berjalannya filantropi di Indonesia selama ini berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. 4 Namun seiring semakin berkembangnya zaman, UU No. 9 Tahun 1961 dinilai sudah tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan filantropi di Indonesia. Misalnya dalam perihal perijinan, UU No. 9 Tahun 1961 mengatur proses perizinan harus dilakukan 3 bulan sekali, padahal jangka waktu yang termasuk sempit ini cukup merepotkan bagi lembaga sosial untuk memperbarui izinnya. Selain itu, sumbangan juga dikotak-kotakkan dalam regional, lokal dan nasional, padahal jika menggunakan media sosial tidak mungkin dibatasi cakupan wilayahnya. Masalah lain berhubungan dengan sanksi dari dilakukannya pelanggaran yang hanya didenda Rp10.000,005 Selain masalah yang disebutkan sebelumnya, salah satu masalah yang cukup krusial adalah sumber dana dan pengelolaan dana lembaga filantropi yang masih abu-abu hingga kini sehingga menimbulkan keraguan bahwa sumbangan benar-benar sampai tepat sasaran.

Pengakuan atas potensi kegiatan filantropi di Indonesia sebagai salah satu unsur penting bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dapat dilihat pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu elemen yang dilibatkan dalam pelaksanaan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) adalah filantropi. Fatwa, A. (2019).

Pasal 3 huruf (b) Perpres No. 59 Tahun 2017 berisi bahwa Perpres tersebut merupakan acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Potensi yang dimiliki oleh filantropi diperlukan agar dapat menjadi salah satu solusi dari masalah-masalah yang dialami oleh Indonesia. Filantropi diharapkan dapat mendukung upaya mengatasi kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan sehingga tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam program pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Legitimasi filantropi di Indonesia sudah diakui melalui Perpres No. 59 Tahun 2017, tapi pengaturan yang bersifat khusus mengenai lembaga filantropi dan kegiatan filantropi itu sendiri justru masih kabur karena dasar hukum yang telah ada dan digunakan sebelumnya, yaitu berdasarkan UU No. 9 Tahun 1961 sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan filantropi. Persoalan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum terkait aturan yang menjadi dasar hukum dari filantropi, baik dari sisi kegiatannya maupun kelembagaannya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Definisi Filantropi dalam Perspektif Hukum**

Filantropi dapat didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yang biasanya diwujudkan melalui donasi, bantuan finansial, atau inisiatif sosial lainnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, filantropi umumnya terfokus pada kegiatan yayasan dan organisasi nirlaba yang beroperasi untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, semua yayasan diharuskan untuk terdaftar secara resmi dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.



Dalam konteks ini, filantropi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas amal semata, tetapi juga sebagai entitas yang diatur secara hukum, yang mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Undang-undang mengatur bahwa setiap yayasan harus memiliki anggaran dasar yang jelas, struktur organisasi, dan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada donatur dan masyarakat bahwa sumbangan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta menghindari kemungkinan penyalahgunaan dana. Setiawan, D. (2018).

Selain itu, perspektif hukum juga menekankan pentingnya etik dalam kegiatan filantropi. Filantropi yang dijalankan dengan etika yang baik tidak hanya melibatkan aspek material, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan

keberlanjutan. Dalam konteks ini, yayasan dan organisasi filantropi diharapkan untuk tidak hanya memberikan bantuan semata, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan berkontribusi kembali kepada komunitasnya. Dengan demikian, definisi filantropi dalam perspektif hukum tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas. Setiawan, D. (2018).

Terakhir, penting untuk mencatat bahwa filantropi dalam konteks hukum juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Setiap kegiatan filantropi harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang dilayani. Hal ini mencakup pengakuan akan keberadaan dan peran masyarakat lokal dalam setiap program yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan perspektif ini, kegiatan filantropi dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu dan kelompok merasa memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Widodo, S. (2021).

<b>Aspek</b>	<b>Uraian</b>
<b>Kegiatan Sosial</b>	Filantropi mencakup berbagai bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.
<b>Kepatuhan Hukum</b>	Setiap kegiatan filantropi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Yayasan, undang-undang perpajakan, dan regulasi lainnya yang mengatur pengelolaan dana dan kegiatan sosial.
<b>Transparansi dan Akuntabilitas</b>	Filantropi dalam perspektif hukum menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Yayasan dan organisasi amal diharuskan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Status Hukum</b>	Filantropi sering kali melibatkan yayasan atau organisasi non-pemerintah yang memiliki status hukum tertentu, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara legal dan memperoleh insentif pajak bagi donatur.



<b>Pengaturan Donasi</b>	Regulasi juga mengatur bagaimana donasi harus diterima dan dikelola. Misalnya, donasi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
<b>Perlindungan Terhadap Pihak Terkait</b>	Hukum memberikan perlindungan kepada donatur dan penerima sumbangan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan untuk kepentingan yang benar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## 4.2 Regulasi Filantropi di Indonesia

Regulasi filantropi di Indonesia ditetapkan melalui berbagai undang-undang yang memberikan kerangka hukum bagi organisasi filantropi. Selain Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga berperan penting dalam pengaturan zakat sebagai bentuk filantropi yang diakui secara luas dalam masyarakat Islam. Dalam undang-undang ini, ada ketentuan mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memastikan zakat disalurkan kepada mustahik dengan benar.

Selain Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga sangat relevan dalam konteks filantropi, terutama di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, serta membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat secara nasional. Dalam regulasi ini, terdapat ketentuan yang mengharuskan lembaga zakat untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik, sehingga memberikan transparansi kepada para muzakki (pemberi zakat) mengenai penggunaan dana zakat. Widodo, S. (2021).

Di samping itu, aspek perpajakan juga menjadi bagian penting dalam regulasi filantropi di Indonesia. Pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi individu atau perusahaan yang melakukan donasi kepada yayasan atau lembaga amal yang terdaftar. Ketentuan ini

tercantum dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan sumbangan yang dilakukan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun, untuk mendapatkan insentif ini, yayasan atau lembaga amal yang menerima sumbangan harus memiliki izin resmi dan laporan keuangan yang terverifikasi oleh otoritas perpajakan. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak partisipasi dari masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan filantropi. Widodo, S. (2021).

Namun, meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur filantropi, tantangan dalam implementasi hukum tetap ada. Beberapa yayasan masih menghadapi masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan filantropi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang ada untuk memastikan bahwa kegiatan filantropi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Terakhir, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang baru dalam pengaturan filantropi. Dengan adanya platform digital untuk donasi, yayasan dan organisasi filantropi dapat menjangkau lebih banyak donatur dan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kegiatan dan penggunaan dana. Namun, hal ini juga memerlukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak para donatur dan penerima manfaat, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk tujuan yang benar. Dengan demikian, regulasi filantropi di Indonesia perlu terus diperbarui agar sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi yang ada.

Aspek Regulasi	Uraian
<b>Dasar Hukum Filantropi</b>	Filantropi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yang mengatur pendirian dan pengelolaan yayasan.
<b>Pendaftaran Yayasan</b>	Setiap yayasan yang ingin beroperasi harus terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini memastikan

	bahwa yayasan memiliki legalitas dan dapat memberikan insentif pajak kepada donatur.
<b>Pengawasan dan Akuntabilitas</b>	Yayasan wajib menyusun laporan keuangan tahunan dan mengaudit laporan tersebut oleh auditor independen. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan.
<b>Peraturan Zakat</b>	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Lembaga amil zakat yang terdaftar juga harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan insentif perpajakan.
<b>Kewajiban Pelaporan</b>	Yayasan diharuskan untuk membuat laporan kegiatan dan penggunaan dana yang jelas dan transparan. Laporan ini harus disampaikan kepada donatur dan masyarakat agar mereka dapat melihat dampak dari sumbangan yang diberikan.
<b>Insentif Pajak</b>	Pemerintah memberikan insentif pajak bagi individu dan perusahaan yang menyumbang kepada yayasan terdaftar. Sumbangan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang bertujuan untuk mendorong lebih banyak sumbangan.
<b>Perlindungan terhadap Donatur</b>	Regulasi juga mencakup perlindungan terhadap donatur, di mana yayasan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data donatur dan penggunaan dana yang disumbangkan. Hal ini untuk membangun kepercayaan antara yayasan dan donatur.
<b>Sanksi bagi Pelanggaran</b>	Terdapat sanksi bagi yayasan yang melanggar ketentuan yang berlaku, baik dalam hal penyalahgunaan dana, laporan keuangan yang tidak sesuai, maupun pelanggaran lainnya. Sanksi ini dapat berupa pencabutan izin atau sanksi administratif.
<b>Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan</b>	Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi kegiatan yayasan dan memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan. Keterlibatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas

	yayasan dan memastikan transparansi.
--	--------------------------------------

### 4.3 Perpajakan dalam Kegiatan Filantropi

Aspek perpajakan dalam kegiatan filantropi di Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan amal. Pemerintah memberikan insentif pajak sebagai bentuk dukungan terhadap donasi yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan kepada yayasan atau lembaga amal yang terdaftar. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan sumbangan yang dilakukan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga mengurangi beban pajak bagi para donatur. Dengan adanya insentif ini, diharapkan lebih banyak individu dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan filantropi, sehingga dampak sosial yang dihasilkan bisa lebih signifikan.



Namun, untuk mendapatkan insentif perpajakan ini, yayasan atau lembaga amal harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah keharusan bagi yayasan untuk terdaftar secara resmi dan memiliki laporan keuangan yang diaudit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disumbangkan tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Selain itu, lembaga yang menerima sumbangan juga diharuskan untuk menyusun laporan tahunan yang mencakup penggunaan dana dan kegiatan yang dilakukan. Dengan mekanisme ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana filantropi dapat terjaga.

Perpajakan dalam kegiatan filantropi juga berkaitan dengan pengaturan zakat, infaq, dan sedekah yang diakui secara hukum. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat yang dikelola oleh lembaga amal zakat yang terdaftar dapat memberikan manfaat bagi muzakki (pemberi zakat) dalam hal pengurangan pajak. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memberikan keuntungan pajak bagi para muzakki. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan zakat dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi perpajakan di sektor filantropi. Beberapa yayasan dan lembaga amal mungkin belum sepenuhnya memahami regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga tidak memanfaatkan insentif pajak secara optimal. Selain itu, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi perhatian, karena adanya kemungkinan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan mengenai perpajakan dan manajemen keuangan untuk yayasan dan lembaga amal perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan perpajakan dalam kegiatan filantropi. Platform digital untuk donasi dapat membantu yayasan dalam menyimpan catatan transaksi dengan lebih efisien dan transparan. Selain itu, teknologi juga memungkinkan para donatur untuk melacak penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Dengan demikian, perpajakan dalam kegiatan filantropi dapat dioptimalkan melalui penggunaan teknologi yang baik, sehingga tujuan sosial yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien.

Aspek Perpajakan	Uraian
<b>Insentif Pajak untuk Donatur</b>	Individu dan perusahaan yang menyumbang kepada yayasan atau lembaga amal yang terdaftar dapat mengurangi jumlah pajak terutang mereka. Sumbangan tersebut diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto.
<b>Pendaftaran dan Izin Resmi</b>	Agar yayasan atau lembaga amal dapat memberikan insentif pajak kepada donatur, mereka harus terdaftar dan memiliki izin resmi dari

	pemerintah. Hal ini menjamin bahwa dana yang disumbangkan akan dikelola secara transparan dan akuntabel.
<b>Pengelolaan Zakat</b>	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan peluang bagi lembaga amil zakat untuk menawarkan insentif pajak bagi muzakki (pemberi zakat). Zakat yang dikelola dengan baik dapat dikurangkan dari pajak penghasilan.
<b>Laporan Keuangan yang Transparan</b>	Untuk mendapatkan insentif pajak, yayasan dan lembaga amal diwajibkan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan di kalangan donatur dan masyarakat.
<b>Perubahan Kebijakan Perpajakan</b>	Kebijakan perpajakan dapat berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, yayasan dan donatur perlu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan untuk memaksimalkan manfaat yang ada.
<b>Penyuluhan dan Edukasi Pajak</b>	Kurangnya pemahaman tentang perpajakan di kalangan pengurus yayasan dan masyarakat menjadi tantangan. Edukasi dan pelatihan tentang perpajakan dan pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan untuk membantu yayasan dalam memanfaatkan insentif pajak.
<b>Keterbatasan dalam Penegakan Hukum</b>	Penegakan hukum terkait regulasi perpajakan di sektor filantropi masih menghadapi tantangan. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana, yang merugikan yayasan yang beroperasi dengan baik.
<b>Dampak Perpajakan terhadap Keberlanjutan Yayasan</b>	Insentif pajak yang baik dapat meningkatkan keberlanjutan yayasan dengan memberikan aliran dana yang lebih stabil. Sebaliknya, kebijakan yang kurang mendukung dapat menghambat kemampuan yayasan dalam menjalankan program mereka.

#### 4.4 Tantangan dalam Pelaksanaan Filantropi

Pelaksanaan filantropi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan dampak dari kegiatan amal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana oleh beberapa yayasan dan organisasi amal. Banyak yayasan yang tidak memiliki laporan keuangan yang jelas atau tidak melakukan audit secara berkala. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap kegiatan filantropi, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi dan sumbangan yang diterima. Ketidakpastian mengenai penggunaan dana dapat menyebabkan skeptisisme di kalangan donatur, yang merasa ragu untuk memberikan sumbangan.

Selain itu, minimnya pemahaman hukum dan regulasi di kalangan pengurus yayasan dan masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak pengurus yayasan yang tidak sepenuhnya memahami peraturan yang mengatur kegiatan filantropi, termasuk persyaratan pendaftaran, pelaporan keuangan, dan kewajiban hukum lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran regulasi yang tidak disengaja dan menghambat kemampuan yayasan untuk mendapatkan insentif perpajakan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, masyarakat umum juga sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka sebagai donatur, yang membuat mereka kurang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan filantropi. Zainuddin, M. (2017).

Tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan antara yayasan dan organisasi amal untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari donatur. Dalam banyak kasus, terdapat banyak yayasan yang memiliki tujuan dan misi yang sama, sehingga menyebabkan kebingungan bagi donatur dalam memilih lembaga yang tepat untuk disumbang. Persaingan yang ketat ini kadang-kadang membuat yayasan lebih fokus pada upaya penggalangan dana daripada pada program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai akibatnya, yayasan mungkin mengabaikan kualitas program yang mereka tawarkan demi menarik lebih banyak sumbangan. Zainuddin, M. (2017).

Kemudian, tantangan juga datang dari keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor filantropi. Banyak yayasan yang beroperasi dengan staf yang minim atau kurang terlatih, sehingga kesulitan dalam mengelola program dan laporan keuangan secara efektif.

Keterbatasan ini dapat mengakibatkan pengelolaan yang buruk, yang berdampak negatif pada hasil dan dampak dari program-program yang dilaksanakan. Keterbatasan pelatihan dan pendidikan bagi pengurus yayasan juga dapat menghambat pengembangan kapasitas dan inovasi dalam kegiatan filantropi.

Terakhir, tantangan yang tidak kalah penting adalah perubahan kebijakan dan regulasi yang seringkali terjadi di sektor ini. Pemerintah dapat menerapkan peraturan baru yang mempengaruhi cara yayasan beroperasi, baik dalam hal pengelolaan dana, pelaporan, maupun kewajiban pajak. Perubahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi yayasan dalam merencanakan program dan strategi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan organisasi filantropi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung perkembangan sektor ini, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi yayasan dalam menghadapi tantangan yang ada. Zainuddin, M. (2017).

<b>Tantangan</b>	<b>Uraian</b>
<b>Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas</b>	Banyak yayasan dan organisasi amal tidak memiliki laporan keuangan yang jelas atau tidak melakukan audit secara berkala, yang mengurangi kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap kegiatan filantropi.
<b>Minimnya Pemahaman Hukum dan Regulas</b>	Pengurus yayasan sering tidak memahami peraturan yang mengatur kegiatan filantropi, termasuk persyaratan pendaftaran dan kewajiban hukum, sehingga menghambat kemampuan yayasan untuk mendapatkan insentif perpajakan.
<b>Persaingan Antara Yayasan</b>	Banyak yayasan memiliki tujuan dan misi yang sama, menyebabkan kebingungan bagi donatur dalam memilih lembaga untuk disumbang. Persaingan ini membuat yayasan lebih fokus pada penggalangan dana daripada pada kualitas program.
<b>Keterbatasan Sumber Daya Manusia</b>	Banyak yayasan beroperasi dengan staf minim atau kurang terlatih, menyulitkan mereka dalam mengelola program dan laporan keuangan secara efektif, yang berdampak negatif pada hasil dan dampak program.



<b>Perubahan Kebijakan dan Regulasi</b>	Kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi cara yayasan beroperasi, menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan program dan strategi jangka panjang, sehingga diperlukan komunikasi yang baik antara pihak terkait.
<b>Keterbatasan Akses Informasi</b>	Banyak masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang kegiatan filantropi dan yayasan yang ada, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan amal.
<b>Stereotip Negatif terhadap Filantropi</b>	Terdapat stereotip atau pandangan negatif terhadap beberapa yayasan yang dianggap tidak transparan atau hanya mengejar keuntungan, yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi.
<b>Kesulitan dalam Pengukuran Dampak</b>	Sulitnya mengukur dampak dari kegiatan filantropi yang dilakukan, karena tidak adanya standar atau metode yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas program.
<b>Isu Keberlanjutan Program</b>	Banyak program filantropi yang tidak memiliki rencana keberlanjutan yang jelas, sehingga setelah pendanaan berakhir, program tersebut tidak dapat dilanjutkan, yang mengurangi dampak jangka panjang.
<b>Ketergantungan pada Sumber Pendanaan Tertentu</b>	Beberapa yayasan terlalu bergantung pada sumber pendanaan tertentu, yang dapat membuat mereka rentan terhadap perubahan ekonomi atau keputusan donor, sehingga mengancam keberlangsungan program yang dijalankan.

## 4.5 Peluang untuk Pengembangan Filantropi di Indonesia

Meskipun tantangan dihadapi, terdapat pula peluang besar untuk pengembangan filantropi di Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui insentif pajak dan kemudahan pendaftaran yayasan. Inovasi teknologi, seperti platform digital untuk donasi, juga telah mempermudah masyarakat untuk berkontribusi secara langsung kepada yayasan dan program sosial. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan edukasi masyarakat mengenai kegiatan filantropi, diharapkan sektor ini dapat tumbuh dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peluang	Uraian
<b>Pertumbuhan Kesadaran Sosial</b> <b>Pertumbuhan Kesadaran Sosial</b>	Masyarakat semakin menyadari pentingnya kontribusi sosial dan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh kegiatan filantropi, yang mendorong lebih banyak individu dan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan amal.
<b>Dukungan Pemerintah</b>	Pemerintah memberikan dukungan melalui regulasi yang menguntungkan, insentif pajak, dan program-program yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan filantropi, seperti pengurangan pajak bagi donasi.
<b>Teknologi Digital untuk Penggalangan Dana</b>	Perkembangan teknologi informasi dan platform digital memungkinkan yayasan untuk menjangkau lebih banyak donatur dan mempermudah proses penggalangan dana, serta memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana.
<b>Kolaborasi dengan Sektor Swasta</b>	Terdapat peluang untuk menjalin kemitraan antara yayasan dan sektor swasta dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), yang dapat meningkatkan sumber daya dan kapasitas dalam pelaksanaan program filantropi.
<b>Inovasi dalam Program Filantropi</b>	Pengembangan program filantropi yang inovatif dan berbasis data dapat meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan amal. Penggunaan teknologi, seperti analisis data dan aplikasi mobile, dapat membantu dalam merancang program yang lebih baik.
<b>Edukasi dan Kesadaran tentang Filantropi</b>	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tentang manajemen filantropi dan kewirausahaan sosial dapat membantu pengurus yayasan dalam mengelola dana dan program dengan lebih baik, serta membangun kepercayaan masyarakat.
<b>Penguatan Jaringan dan Komunitas</b>	Pembentukan jaringan dan komunitas di antara yayasan, organisasi non-pemerintah, dan donatur dapat memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan serta sumber daya, yang mendukung pengembangan filantropi yang lebih efektif.

<b>Fokus pada Isu-Isu Sosial Terkini</b>	Peluang untuk mengembangkan program filantropi yang berfokus pada isu-isu sosial terkini, seperti perubahan iklim, kesehatan, dan pendidikan, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat dan sektor swasta.
<b>Peningkatan Keterlibatan Generasi Muda</b>	Generasi muda semakin tertarik untuk terlibat dalam kegiatan filantropi dan sukarela, sehingga ada peluang untuk mengembangkan program yang melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan amal.
<b>Diversifikasi Sumber Pendanaan</b>	Pengembangan model pendanaan yang beragam, seperti crowdfunding, investasi sosial, dan kemitraan, dapat membantu yayasan untuk tidak bergantung pada satu sumber dana saja, meningkatkan keberlanjutan program filantropi.

## **Kesimpulan**

Filantropi di Indonesia memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks hukum, filantropi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan. Regulasi filantropi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana.

Perpajakan juga memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan filantropi, di mana pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong sumbangan dari individu dan perusahaan. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi, pemahaman hukum, dan keterbatasan sumber daya masih harus diatasi agar kegiatan filantropi dapat berkembang secara efektif.

Selain itu, peluang untuk pengembangan filantropi di Indonesia sangat besar, terutama dengan pertumbuhan kesadaran sosial, dukungan pemerintah, dan kemajuan teknologi digital. Edukasi dan pelatihan tentang manajemen filantropi dan perpajakan juga perlu ditingkatkan agar pengurus yayasan dapat mengelola dana dan program dengan lebih baik.

Dengan demikian, untuk memaksimalkan potensi filantropi di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan amal yang transparan, akuntabel, dan berdampak, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.

## **Ringkasan dalam Bentuk Hubungan (Relationship)**

### **1. Definisi Filantropi:**

Filantropi adalah kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, diatur oleh hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

### **2. Regulasi Filantropi:**

Diatur oleh Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, memastikan kegiatan amal memenuhi standar hukum dan memiliki izin resmi untuk beroperasi.

### **3. Perpajakan dalam Filantropi:**

Pemerintah memberikan insentif pajak bagi donatur yang menyumbang kepada yayasan terdaftar, yang berfungsi untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan amal.

### **4. Tantangan dalam Pelaksanaan Filantropi:**

Tantangan meliputi kurangnya transparansi, pemahaman hukum yang minim, keterbatasan sumber daya, dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu.

### **5. Peluang untuk Pengembangan Filantropi:**

Kesadaran sosial yang meningkat, dukungan pemerintah, dan kemajuan teknologi digital membuka peluang untuk pengembangan filantropi, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta.

### **6. Kesimpulan Umum:**

Filantropi dapat berkembang secara positif dengan adanya regulasi yang tepat, dukungan pajak, dan partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan dampak sosial yang lebih besar.

## Hubungan Antara Unsur

1. **Regulasi** mendukung **Transparansi** dan **Akuntabilitas** dalam **Filantropi**.
2. **Insentif Pajak** berfungsi untuk mendorong **Sumbangan** yang lebih besar dari **Masyarakat** dan **Perusahaan**.
3. **Tantangan** yang ada harus diatasi untuk memaksimalkan **Peluang** yang dapat mendukung pengembangan **Filantropi**.
4. **Kolaborasi** antara **Pemerintah**, **Masyarakat**, dan **Sektor Swasta** penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi **Filantropi**.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2020). *Filantropi dan Perpajakan: Insentif dan Pengaruhnya terhadap Kegiatan Sosial*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 12(1), 45-60.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2018). *Panduan Pengelolaan Zakat dan Filantropi di Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.
- Fatwa, A. (2019). *Regulasi Filantropi di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 9(2), 115-130.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Kegiatan Filantropi dan CSR di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia. (2020). *Manajemen Filantropi dan Kewirausahaan Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Setiawan, D. (2018). *Dampak Insentif Pajak terhadap Sektor Filantropi di Indonesia*. Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik, 4(3), 25-40.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widodo, S. (2021). *Filantropi dan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(1), 10-25.
- Zainuddin, M. (2017). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Filantropi di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(4), 89-102.